

KEPEMIMPINAN NASIONAL
DAN PEMBANGUNAN PERADABAN BANGSA¹

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH².

KEPEMIMPINAN NASIONAL

Kepemimpinan menyangkut pengertian sistem dan persona. Dalam praktik keduanya sama-sama diperlukan secara seimbang. Namun kedudukan dan peranannya dalam praktik berubah seiring dengan perkembangan tingkat peradaban bangsa. Semakin tinggi tingkat peradaban, semakin besar peranan sistem daripada persona. Sistem aturanlah yang memimpin kita dalam pengertian yang sesungguhnya, sedangkan individu-individu yang duduk dalam jabatan-kabatan kepemimpinan hanyalah wayang yang berfungsi sebagai *uswatun hasanah*, baik dalam rangka upaya:

- (i) menata agar sistem berkembang dinamis untuk memenuhi kebutuhan bersama,
- (ii) menggerakkan agar sistem bekerja efektif dan efisien, dan sekaligus
- (iii) menjadikan diri sendiri sebagai contoh atau teladan dalam menaati semua norma yang terkandung dalam sistem tersebut.

Sistem aturan yang demikian itulah yang kita kenal sebagai prinsip yang biasa disebut sebagai doktrin *'the rule of law, not of man'*, *'the rule of law'*, bukan *'the rule of man'*, apalagi *'the rule of dictatorship'*.

Dalam Islam, pengertian *'imamah'* juga dapat berarti orang dan dapat pula berarti sistem aturan. Bahkan, nabi Muhammad tidak disebut sebagai al-Imam,

¹ Orasi ilmiah Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 20 Maret 2013.

² Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penasihat Komnasham RI, Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU, 2010-2011), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, 2012-2017), Pendiri dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKRI, 2003-2008), Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan (Wantimpres RI, 2009-2010), Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI dan Anggota Tim Ahli BP-MPR untuk Perubahan UUD 1945 tahun 2002-2003, Asisten Wakil Presiden RI (1997-1999), Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1993-1997), dan pernah menjabat Pembantu Rektor III UIA (1985-1992) dan Wakil Direktur Sekolah Tinggi Wiraswasta As-Syafi'iyah (1982-1984).

melainkan sebagai “*uswatun hasanah*” dalam ketaatan kepada Allah swt. Yang disebut al-imam justru adalah al-Quranul Karim. “Ya Allah, aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabi dan rasul, dan al-Quran adalah **imamku**” (*Rodhitu billaha robba, wabil-Islama diena, wabi Muhammadin nabiiyya wa rasuula, wabil-qurani imaama*). Ya Allah sayangilah kami dengan al-Quran, jadikanlah al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya penerang, petunjuk, dan rahmat bagi kami (*Allahummarhamna bilquran, waj’al hulana imaaman wa nuura, wa huda wa rahmah*). Semua orang yang beriman, dilarang keras untuk tunduk kepada apapun yang selain kepada sistem aturan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh ada ketundukan kepada siapapun dalam ma’syiat kepada Allah swt (*La tho’ata li makhluqin fi ma’syati al-kholiq*).

Karena itu, dalam sistem kenegaraan, kita diharuskan hanya tunduk kepada sistem aturan, bukan kepada kultus individu dalam hubungan atasan dan bawahan ataupun dalam hubungan ‘*patron-client*’. Sistem kenegaraan kita sudah diatur dalam UUD sebagai satu kesatuan sistem konstitusi dan sistem hukum yang penyusunan dan perumusannya sudah disepakati bersama menurut prosedur-prosedur demokrasi modern. Kita hanya diizinkan untuk tunduk dan taat kepada atasan, sepanjang atasan itu dapat dijadikan teladan dalam ketaatannya kepada sistem aturan dan benar-benar memimpin, sehingga sistem aturan itu bekerja atau berfungsi dengan efektif untuk kepentingan bersama.

Sudah tentu, dalam pelaksanaan konkritnya dalam kegiatan bernegara, pengertian tentang “*the rule of law, not of man*” seperti dikemukakan di atas, haruslah kita mulai dengan pengertian “*the rule of the constitution*” yang di dalamnya tercakup pengertian Pancasila dan UUD 1945, dilengkapi oleh pilar-pilar penting yang tercermin dalam semboyan “*bhinneka-tunggal-ika*” dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua warga negara dan semua institusi kenegaraan dan kemasyarakatan, tidak terkecuali Universitas Islam As-Syafi’iyah, sebagai lembaga pendidikan tinggi tempat berhimpunnya kaum cerdik cendekia, harus terus memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, dan prinsip kebhinnekaan dalam wadah NKRI benar-benar terjabarkan dalam pelbagai kebijakan operasional di segala bidang dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan

berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat diwujudkan secara nyata.

Karena itu, kita harus menyerukan, mendorong dan mengajak siapa saja, termasuk siapa saja yang nanti terpilih dan dipercaya menjadi Presiden, menjadi Wakil Presiden, menjadi Menteri, menjadi Kepala Daerah, menjadi Ketua lembaga-lembaga negara ataupun jabatan-jabatan kepemimpinan dimanapun dan kapanpun juga, hendaklah jangan bersikap feodal, egois, memikirkan diri sendiri, tetapi justru harus menjadikan diri masing-masing sebagai teladan dalam (i) menata agar sistem itu berkembang dinamis untuk memenuhi kebutuhan rakyat, (ii) menggerakkan agar sistem itu bekerja dengan efektif dan efisien, dan (iii) sekaligus menjadi contoh dalam sikap menaati semua aturan yang terkandung di dalam sistem itu.

TIGA TIPE KEPEMIMPINAN

Di antara banyak pendapat mengenai tipe-tipe dan ciri-ciri ideal seorang pemimpin, dapat dikemukakan disini adanya tiga tipe kepemimpinan, yaitu:

- (i) tipe kepemimpinan yang bersifat transaksional (*transactional leadership*);
- (ii) tipe kepemimpinan yang bersifat transformatif (*transformational leadership*);
dan
- (iii) tipe kepemimpinan moral yang memimpin dengan dirinya, dengan karakter dan kepribadiannya sendiri (*moral leadership*).

Pemimpin dan Kepemimpinan Transaksional. Seorang pemimpin dikatakan bersifat transaksional jika semua tindakan dan keputusan yang dibuatnya selalu diperhitungkan dari kacamata untung rugi bagi kepentingan pribadinya sendiri ataupun keluarga dan kelompoknya sendiri. Dengan begitu, keputusan biasanya dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang berjangka pendek, dan tiap-tiap jabatan diperhitungkan dalam konteks '*political trade-off*', alias politik dagang sapi. Jabatan diberikan kepada tokoh yang mewakili suatu kelompok atau golongan dengan maksud untuk meredam sikap kritis dari para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga pemberian suatu jabatan kepada seseorang dilihat

sejauhmana hal tersebut memiliki nilai tukar yang sepadan untuk keuntungan politik bagi pemimpin yang memberikan jabatan. Tipe pemimpin dan kepemimpinan yang seperti inilah yang biasa disebut sebagai pemimpin dan kepemimpinan yang bersifat transaksional yang tidak ubahnya seperti seorang '*pedagang kekuasaan*'.

Pemimpin dan Kepemimpinan Transformational. Sebaliknya seorang pemimpin dikatakan bersifat transformatif, jika ia memiliki obsesi yang jauh ke depan untuk masyarakatnya dan mempunyai tekad yang kuat dalam dirinya untuk perbaikan kehidupan bersama dalam jangka panjang, yang sungguh-sungguh menuntunnya dalam bersikap dan berperilaku serta bertindak konkrit dalam menetapkan keputusan-keputusan dan menjalankan keputusan-keputusan itu dalam kepemimpinannya. Pemimpin transformatif tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan masyarakat yang dipimpinnya yang dari waktu ke waktu diimpikan agar terus bertransformasi dan terus berkembang kualitas hidup dan kehidupannya menuju tingkat peradaban menurut ukuran perkembangan kemanusiaan dari zaman ke zaman. Dalam bentuk konkritnya, pemimpin dan kepemimpinan transformatif atau transformational tersebut benar-benar bekerja efektif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan bersama masyarakatnya.

Pemimpin dan Kepemimpinan Moral. Pemimpin, di samping melakukan transformasi, juga diharapkan tampil dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang tampil tidak dengan dirinya sendiri, tidak ubahnya sebagai aktor pemain drama dalam kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Karena itu, pemimpin dapat dikatakan bermoral, bermartabat, berkarakter atau berakhlak mulia, jika ia memimpin dengan integritas dirinya sendiri, bukan dengan orang lain.

Dalam iklim demokrasi pasar bebas dimana semua jabatan kepemimpinan publik dikompetisikan dan diperebutkan secara bebas, besar kemungkinan bahwa untuk kepentingan mendapatkan dukungan dan legitimasi sosio-politis, para pemimpin harus bersikap populis, dekat dengan rakyat. Untuk itu, ada tuntutan bagi setiap pemimpin politik untuk hadir, bukan dengan dirinya sendiri. Para pemimpin politik harus datang dengan kepura-puraan agar rakyat menganggap

dirinya dekat dengan rakyat, layak dipercaya, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Namun, jika pemimpin datang dengan kepura-puraan seperti demikian, maka sesungguhnya ia tidak memimpin dengan dirinya sendiri, melainkan datang sebagai pribadi orang lain. Inilah pemimpin yang tidak berkarakter, dan bahkan pemimpin yang berwatak amoralis.

Dari ketiga tipe kepemimpinan itu, bangsa kita membutuhkan tipe kedua dan ketiga. Syukur-syukur jika dalam diri setiap warga dan alumni Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) dapat menggabungkan kedua tipe transformatif dan moralis tersebut di atas sekaligus. Dewasa ini dan di masa-masa mendatang, apalagi untuk tujuan membangun peradaban bangsa yang tinggi di tataran dunia, kita memerlukan lapisan para pemimpin di semua tingkatan yang berwatak moralis dan transformasional.

KEPEMIMPINAN YANG ADIL

Tugas utama pemimpin adalah membangun keadilan. Seorang pemimpin harus adil dalam bersikap sebagai persona, dan sekaligus juga harus berperan dalam membangun dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bersama. Karena itu, dalam Islam, ciri pertama orang yang dijanjikan akan mendapat perlindungan dari Allah di hari akhirat kelak adalah pemimpin yang adil (*imaamun 'adilun*). Kelompok manusia yang dipastikan akan mendapat tempat yang layak di sisi Allah kelak di hari akhirat adalah mereka yang tergolong ke dalam kelompok pemimpin yang adil.

Mengapa keadilan diutamakan? Sebabnya ialah setiap orang mempunyai kehendak bebasnya sendiri-sendiri sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Dengan status sebagai 'khalifah Allah' itu niscaya setiap pribadi manusia diberi kesempatan untuk saling berkompetisi dan saling bekerjasama dalam kebajikan dan ketaqwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Dalam arena persaingan dan kerjasama itu, semua orang dan semua kelompok akan memiliki kesempatannya sendiri-sendiri untuk tumbuh dan berkembang membangun peri kehidupan yang layak untuk kemanusiaan. Namun, adanya persaingan harus diimbangi dengan

kerjasama yang sehat di antara sesama. Karena itu, pemimpin di samping harus memelihara dan bahkan mendorong kebebasan dalam peri kehidupan bersama, juga harus membina kerukunan dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Jika tidak, kebebasan berkompetisi dapat melahirkan konflik dan pertentangan yang menyebabkan perkembangan tidak terarah dan bahkan konflik dan permusuhan yang tidak produktif.

Selain itu, kebebasan itu sendiri, secara alamiah juga pasti menyebabkan terjadinya pertumbuhan di segala bidang kehidupan, baik social ekonomi, social politik, maupun social budaya. Namun perkembangan social ekonomi dan juga politik sebagai akibat persaingan bebas itu tidak mungkin dinikmati oleh semua orang dengan kemampuan yang sama. Makin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi social tentu makin berpeluang untuk menikmati keuntungan lebih banyak dari adanya kebebasan. Akibatnya, dinamika persaingan bebas itu selalu mengakibatkan terjadinya kesenjangan struktural dimana-mana di semua bidang ekonomi, politik, ataupun kebudayaan. Kesenjangan di bidang social ekonomi melahirkan jurang kaya dan miskin. Kesenjangan di bidang politik menyebabkan terjadinya oligarki kekuasaan. Kesenjangan di bidang kebudayaan menyebabkan makin tumbuh suburnya budaya paternalism dan bahkan feodalisme.

Karena itulah maka tugas utama para pemimpin tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan dengan terlebih dulu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang adil dalam bersikap. Itu sebabnya maka pemimpin yang adil atau “imaamun ‘adilun” dipandang sebagai manusia ideal dalam kehidupan bersama. Pemimpin yang adil itulah yang diharapkan melakukan upaya-upaya sistemik agar struktur kehidupan bermasyarakat tidak mengalami kesenjangan yang semakin menganga tetapi sebaliknya harus mampu mengatasi kesenjangan atau ketimpangan structural itu di segala bidang kehidupan bersama. Dengan perkataan lain, pemimpin yang adil itu harus mampu membangun keadilan social bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, pemimpin harus mampu (i) menjamin dan menjaga iklim kebebasan bagi seluruh rakyatnya; (ii) menjaga dan memelihara solidaritas dan kerukunan hidup bersama seluruh rakyatnya; (iii) menjadi teladan dalam bersikap

adil antar sesama warga; (iv) menggerakkan roda organisasi pemerintahan untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan struktural di semua bidang kehidupan. Dengan adanya struktur kehidupan yang berkeadilan itulah peradaban dapat tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya dalam Pancasila prinsip kemanusiaan yang adil dirumuskan secara tidak terpisahkan dari pengertian 'beradab', yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Peradaban hanya dapat berkembang dalam struktur yang berkeadilan, sedangkan keadilan merupakan ciri ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dirumuskan dalam sila pertama Pancasila.

Yang terakhir, dalam menjalankan kepemimpinannya untuk menjamin dan mewujudkan keempat hal tersebut, setiap pemimpin harus pula menyadari bahwa (v) semua itu adalah rangka keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua tindakan kepemimpinan yang dilakukan haruslah disadari didasarkan atas keyakinan para pemimpin yang bersangkutan terhadap ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sumber kekuasaan yang sesungguhnya yang telah memberi kesempatan kepadanya untuk mengabdikan bagi kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk persatuan dan kerukunan hidup bersama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

PERKEMBANGAN PERADABAN BANGSA

Bangsa kita adalah bangsa besar dan memiliki sejarah, baik yang tercatat ataupun yang tidak tercatat, yang sudah sangat panjang. Dinamika perkembangan peradaban bangsa kita bahkan jauh lebih panjang dari daya ingat kolektif kita sendiri mengenai sejarah. Catatan sejarah kita paling jauh adalah pada sekitar ke 6, 7 dan seterusnya, sebatas kerajaan-kerajaan kecil di Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, dan di Sumatera. Sejarah peradaban bangsa kita selalu dikaitkan dengan peranan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang luas wilayah kekuasaannya mencakup hampir dan bahkan melebihi wilayah negara Republik Indonesia yang sekarang. Namun, dari tulisan-tulisan para ahli seperti Stephen Oppenheimer (*Eden in the East*, 1999), Arysio Nunes dos Santos (*Atlantis: The Lost Continent*

Finally Found, 2005), dan lain-lain, kita juga mendapatkan catatan lain mengenai perkembangan peradaban bangsa kita yang hidup di benua maritim Indonesia yang dulunya sebuah benua besar yang dalam studi disebut '*Sunda Land*'. Peradaban Altanlis yang hidup dalam diperdebatkan dalam sejarah, menurut para ahli ini adalah Indonesia, yang hidup dengan peradaban yang sangat tinggi pada sekitar 11-17 ribu tahun yang lalu. Karena itu, bangsa kita tidak boleh abai dengan catatan-catatan sejarah kita di masa lalu, karena hal itu justru dapat menjadi modal untuk menatap ke depan.

Sekarang, Indonesia adalah negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah. Sekarang kita sudah menerapkan sistem demokrasi yang dipandang sebagai bentuk paling modern dan mutakhir dalam tingkat perkembangan peradaban politik umat manusia dewasa ini. Dengan sistem ini, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga sesudah India dan Amerika Serikat. Dengan kondisi sumberdaya alam yang kaya, maka jika pada suatu saatnya nanti, tingkat rata-rata pendidikan penduduk dan kualitas rata-rata sumberdaya manusia Indonesia terbaru di masa depan sudah mencapai tingkat rata-rata penduduk Eropah atau Amerika Serikat, maka niscaya Indonesia dapat segera duduk sejajar dengan negara paling maju sekalipun sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Karena itu, kunci yang pokok bagi semua pemimpin dan calon pemimpin Indonesia kini dan mendatang hendaklah menyadari posisi Indonesia pada hari ini, dan bertekad kerja serta bekerja konkrit dan terarah untuk memacu perkembangan tingkat peradaban Indonesia menuju masa depan dalam jangka panjang itu.

Karena itu, para pemimpin Indonesia dari zaman ke zaman, dari periode ke periode, hendaklah jangan saling meniadakan. Marilah kita hormati jasa semua pendahulu kita. Jasa Soekarno, Suharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri sungguh sangat besar artinya bagi sejarah bangsa kita di masa depan. Demikian pula, sumbangan yang telah diberikan oleh kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono selama 10 tahun harus kita dan dihargai oleh generasi yang akan datang sebagai rangkaian transformasi peradaban bangsa kita secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Presiden Soekarno dan generasinya telah berhasil merintis perjuangan kebangsaan dengan melakukan

upaya pembebasan bangsa dari belenggu penjajahan, yang oleh Presiden Soeharto dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan itu dengan karya-karya nyata pembangunan bangsa.

Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan zaman, sistem politik kita harus ditransformasikan menjadi sistem demokrasi modern. Itulah yang dilakukan dengan sangat baik oleh tiga presiden transisional kita, yaitu Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri yang berbagi kesempatan memimpin dalam waktu yang sangat singkat antara 2-3 tahun sejak tahun 1998-2004. Trio kepemimpinan transisional inilah yang mengantarkan bangsa kita ke zaman baru dengan sistem demokrasi modern yang kita terapkan. Presiden pertama yang mengisi dan mempraktikkan sistem demokrasi modern itu adalah Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono dari tahun 2004 sampai tahun 2014 nanti untuk selanjutnya diteruskan oleh Presiden berikutnya.

Semuanya sambung menyambung. Oleh karena itu, sistem kepemimpinan nasional itu harus dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Kita tidak boleh membuatnya menjadi terpisah-pisah dengan saling meniadakan. Karena itu, di kalangan ilmuwan dan kaum cerdik cendekia, sudah seharusnya kebiasaan untuk saling meniadakan itu. Kita juga harus menghentikan kebiasaan yang memecahbelahkan bangsa kita dengan analisis-analisis yang menciptakan kotak-kotak ideologi, seperti antara kubu Islamis versus nasionalis, kubu A versus B, dan sebagainya. Kita adalah satu satu nusa, bangsa, dan satu bahasa persatuan dalam satu wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 harus dilanjutkan dan diisi oleh setiap generasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bangsa kita adalah bangsa besar yang tercermin dalam luasnya wilayah dan kekayaan sumberdaya alamnya yang disertai oleh besarnya jumlah sumberdaya manusianya beserta kompleksitas kebudayaan yang kaya dan beraneka. Ragam tradisi kebudayaan bangsa kita sangat majemuk. Aneka tradisi budaya tumbuh dalam kehidupan pelbagai suku bangsa yang hidup di lautan dan di daratan, di

atas 17.000 pulau banyaknya, menyebabkan Indonesia tercatat sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia.

Kemajemukan itu harus dipandang sebagai kekayaan bangsa. Kuantitas sumberdaya manusia yang banyak juga harus dipandang sebagai kekuatan. Bahwa kualitas sumberdaya manusianya harus ditingkatkan agar setaraf atau bahkan lebih tinggi dari kualitas rata-rata dunia, tentu saja sangat benar. Akan pandangan negatif yang selama ini biasa dikembangkan mengenai rendahnya mutu atau kualitas sumber daya manusia Indonesia harus juga diperbaiki. Sikap negatif semacam itu dapat menyebabkan sikap rendah diri kita dalam menghadapi persaingan dunia. Dengan kerja keras kita meningkatkan kualitas pendidikan dan pekerjaan, kita harus berjuang untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia di atas rata-rata penduduk dunia.

Jika pada saatnya kelak hal itu terwujud, maka kekuatan bangsa kita yang pasti adalah bahwa alam sekitar sangat kaya, dan pada saat itulah, bangsa kita akan mencapai derajat peradabannya yang setara dan bahkan menjadi bangsa keempat terbesar di dunia, sesuai dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, di samping kita harus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, kita juga harus menjaga agar kekayaan sumberdaya alam kita berkelanjutan dan tidak dikuras habis oleh nafsu serakah segelintir orang yang hanya berpikir jangka pendek dan untuk kepentingannya sendiri. Untuk itulah sekali lagi bangsa kita memerlukan para pemimpin yang moralis dan sekaligus transformatif. Bangsa kita tidak memerlukan orang-orang yang hanya pandai berebut kekuasaan untuk kepentingan jangka pendek dan transaksional dengan menjadikan kekuasaannya sebagai alat tukar menukar kesenangan hidup hedonis belaka.

Demikian sedikit masukan dari saya dalam rangka acara wisuda Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) Jakarta. Semoga orasi ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dan menjadi pendorong untuk belajar dan bekerja lebih baik untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, untuk kepentingan kemanusiaan, dan untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sebagai bekal bagi kita semua menuju hari esok dan hari akhir yang penuh kebahagiaan.